



ANDI SUWIRTA

Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Kasus BAPINDO Tahun 1994 dalam Sorotan Surat Kabar *Republika* di Jakarta

ABSTRAKSI: Salah satu tugas penting pers adalah memberikan “news” (berita) dan “views” (pandangan) dalam menanggapi peristiwa-peristiwa penting kepada masyarakat. Sementara itu, pemerintah Orde Baru (1966-1998), yang dalam banyak kasus ditandai oleh praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nopotisme), sangat dominan dalam mengontrol dan membredel pers yang dinilai kritis dan oposisional. Artikel ini, dengan menggunakan metode historis dan pendekatan kualitatif, mengkaji dan menganalisis tentang surat kabar “Republika” di Jakarta, yang pada tahun 1994, memberikan “news & views” kepada kasus BAPINDO (Bank Pembangunan Indonesia), melalui kritik-kritik sosial yang tajam dan jenaka dalam kolom catatan pojoknya, “Rehat”. Hasil kajian menunjukkan bahwa konteks kasus BAPINDO, yang melibatkan tiga pejabat penting pada masa Orde Baru, harus dilihat dalam persaingan politik dari kelas menengah Muslim yang tengah pasang pada tahun 1990-an, yang pada masa-masa awal Orde Baru di tahun 1970/1980-an mengalami surut dan dimarginalisasikan. Dalam konteks pers, surat kabar “Republika”, yang dibidani oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), ingin juga menunjukkan peran dan persaingan politiknya dengan media arus utama pada masa Orde Baru, yang didominasi oleh golongan non-Muslim, atau media massa yang netral terhadap agama Islam.

KATA KUNCI: Pers dan Kritik Sosial; Surat Kabar *Republika*; Kasus BAPINDO; Pemerintah Orde Baru; Kelas Menengah Muslim Indonesia.

ABSTRACT: “Press and Social Criticism in the Time of New Order: Case of BAPINDO in 1994 in the Spotlight of *Republika* Newspaper in Jakarta”. One of the important tasks of the press is to provide “news and views” in responding the important events to the community. Meanwhile, the New Order government (1966-1998), which in many cases was characterized by the practice of KKN (Corruption, Collusion, and Nopotism), was very dominant in controlling and banning the press which was considered critical and opposition. This article, using historical methods and qualitative approaches, reviews and analyzes the “*Republika*” newspaper in Jakarta, which in 1994 gave “news & views” to the case of BAPINDO (Indonesian Development Bank), through sharp social criticisms and witty in the column of notes in the corner, “Rehat” (Break). The findings show that the context of the BAPINDO case, which involved three important officials during the New Order, must be seen in the political competition of the Muslim middle class that was emerging in the mid-1990s, which in the early days of the New Order in the 1970s/1980s was experiencing recede and marginalized. In the context of the press, the newspaper of “*Republika*”, which is staffed by ICMI (Association of Indonesian Muslim Scholars), wants also to show its role and political rivalry with mainstream media in the New Order, which is dominated by non-Muslims, or the masses media who are neutral towards Islam.

KEY WORD: Press and Social Criticism; *Republika* Newspaper; Case of BAPINDO; New Order Government; Indonesian Muslim Middle Class.

About the Author: Andi Suwirta, M.Hum. adalah Dosen Senior di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia), Jalan Dr. Setiabudi No.229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia. Alamat email: suciandi@upi.edu

Suggested Citation: Suwirta, Andi. (2018). “Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Kasus BAPINDO Tahun 1994 dalam Sorotan Surat Kabar *Republika* di Jakarta” in *INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*, Volume 3(2), August, pp.161-186. Bandung, West Java, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI with ISSN 2443-1776 (print).

Article Timeline: Accepted (April 21, 2018); Revised (June 22, 2018); and Published (August 31, 2018).

PENDAHULUAN

Walaupun rakyat Indonesia telah merayakan HUT (Hari Ulang Tahun) ke-50 kemerdekaannya pada tahun 1995, banyak para pengamat yang hirau dengan kehidupan berdemokrasi suatu negara menyatakan bahwa mungkin harus menunggu lebih lama lagi untuk dapat merayakan kebebasan mereka. Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah manifestasi dalam kehidupan demokrasi. Proses pembangunan dan modernisasi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, belum tentu sejalan dengan kualitas kehidupan berdemokrasi. Seperti yang terjadi juga di negara-negara tetangga: Singapura, Malaysia, atau Brunei Darussalam, bahwa pembangunan ekonomi dan modernisasi ternyata belum mendorong peningkatan kebebasan politik dan demokrasi. Dalam konteks ini pula, pemerintahan Presiden Soeharto (1966-1998), yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun, gagal menjamin stabilitas negara akibat tiadanya proses demokrasi yang matang (Alatas, 1983; Boot & McCawley, 1990; Maarif, 2002; Basri *et al.*, 2013; dan Ladiqi & Wekke, 2018).

Kalaupun Soeharto berhasil menjadi Presiden untuk yang ketujuh kalinya, setelah PEMILU (Pemilihan Umum) tahun 1997, ia tetap tidak dapat menghindari kenyataan bahwa rejim Orde Baru yang dibangunnya sejak tahun 1966 telah memasuki masa senja. Presiden Soeharto – yang pada masa itu sudah berusia 76 tahun dan kelihatan makin letih dan gemuk – tidak lagi dapat mengendalikan negara kepulauan berpenduduk 200 juta orang lebih ini seperti pada masa jaya-jayanya tahun 1970/1980-an. Karena itu, sebagian besar rakyat Indonesia bergembira, meskipun

ada juga yang terperangkap dalam nostalgia, ketika Presiden Soeharto turun dari kekuasannya pada bulan Mei 1998 (Liddle, 1992; Gaffar, 1999; Winters, 1999; Aspinall ed., 2000; Fatah, 2000; dan Elson, 2001).

Sementara itu, proses modernisasi dan pembangunan ekonomi di Indonesia, yang dimulai sejak awal tahun 1970-an, memang telah mendatangkan kekayaan yang luar biasa bagi segelintir orang, terutama Presiden dan orang-orang di dekatnya, di tengah-tengah kemiskinan masyarakat yang masih banyak. Kelas “elite” tersebut dapat menikmati kehidupan kosmopolitan yang mewah dan memiliki hampir semua kebebasan elementer golongan tingkat atas. Mereka bahkan diberikan kebebasan berbicara, asal keluhan dan *omelan* yang ada dilontarkannya di ruangan tertutup (Assegaff, 1983; Boot & McCawley, 1990; Winters, 1999:8; dan Baswir, 2004). Dalam kehidupan politik Orde Baru, M.C. Ricklefs (1998), sejarawan dari Australia, mencatat dua unsur penting, sebagai berikut:

Pertama, berkebalikan dengan masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), pemerintahan Orde Baru bukannya berusaha untuk memobilisasi, melainkan mengendalikan keterlibatan rakyat dalam berpolitik. Dengan demikian, hasil Pemilihan Umum agak sulit ditafsirkan sebagai ukuran pilihan rakyat. *Kedua*, terjadi kesepakatan politik yang penting. Organisasi Islam, khususnya, dianggap secara luas sebagai semacam oposisi tidak resmi terhadap pemerintah (Ricklefs, 1998:438).

Ancaman instabilitas terhadap pemerintah Orde Baru sudah dimulai sejak tahun 1970-an, ketika muncul peristiwa MALARI (Malapetaka 15 Januari) tahun 1974. Peristiwa yang ditandai oleh demonstrasi mahasiswa dan

berujung pada kerusuhan anti-Jepang itu adalah bentuk persaingan nyata antara para jenderal “profesional” (yang diwakili oleh Jenderal Soemitro) dengan para jenderal “uang” (yang diwakili oleh Letnan Jenderal Ali Moertopo). Kemengangan atas konflik yang keras dalam peristiwa MALARI tahun 1974 itu nampaknya dimenangkan oleh Letnan Jenderal Ali Moertopo dan orang-orang dekatnya, termasuk dari Kolonel Benny Murdani. Pasca peristiwa MALARI tahun 1974, juga ditandai oleh semakin dominannya peran perwira-perwira tinggi dalam TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat) yang Islam *Abangan* dan non-Muslim, sehingga menunjukkan watak politik pemerintah Orde Baru yang anti Islam (Geertz, 1981 dan 1986; Britton, 1996; Crouch, 1999; Jenkins, 2010; dan Jazimah, 2013).

Memasuki tahun 1980-an, politik pemerintah Orde Baru terhadap Islam semakin represif dan diskriminatif. Diberlakukannya azas tunggal Pancasila, sebagai satu-satu azas dalam organisasi politik dan kemasyarakatan, semakin mendapat reaksi keras dan perlawanan sengit dari umat Islam. Peristiwa berdarah di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada tahun 1984; peristiwa Talangsari di Lampung, Sumatera bagian Selatan pada tahun 1989; dan peristiwa kekerasan lainnya terhadap umat Islam di Indonesia menunjukkan watak represif dan diskriminatif dari politik pemerintah Orde Baru. Lingkaran elite dalam Presiden Soeharto, yang umumnya terdiri dari para perwira ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang non-Muslim, Islam *Abangan*, atau Nasionalis Sekuler, merupakan refleksi dari sikap politik pemerintah Orde Baru yang anti Islam.

Sikap anti Islam dari pemerintah itu juga didukung oleh media massa *mainstream* (arus utama) milik para pemodal yang umumnya non-Muslim atau nasionalis sekuler, seperti surat kabar *Kompas*, *Suara Pembaharuan*, *Media Indonesia*, dan sebagainya (Geertz, 1981 dan 1986; Hill, 1995 dan 2011; Said, 1998; Crouch, 1999; Sulaiman, 2008; dan Jenkins, 2010).

Memasuki tahun 1990-an, watak politik Orde Baru terhadap Islam di Indonesia mulai berubah, yakni dari sikap represif kepada sikap akomodatif. Hal ini terjadi, sebagian, karena faktor semakin menguatnya golongan kelas menengah Muslim di Indonesia. Faktor lainnya juga karena mulai ada pergeseran elite di lingkaran dalam Presiden Soeharto, dari perwira tinggi ABRI yang non-Muslim dan Nasionalis Sekuler kepada para perwira Muslim atau Nasionalis-Islam. Media massa pada masa itu menyebut golongan perwira Muslim atau Nasionalis-Islam dengan istilah ABRI “Hijau”; manakala para perwira non-Muslim dan Nasionalis Sekuler, pada perkembangan berikutnya, akan mengklaim diri mereka sebagai ABRI “Merah-Putih” (Ali & Effendy, 1986; Anwar, 1995; Hudini, 2009; Kamsi, 2013; dan Legowo, Krisnadi & Sumartono, 2013).¹

Adalah menarik untuk mencermati peta pertarungan politik di tingkat elite Orde Baru pada tahun 1990-an. Pengaruh Benny Murdani, dan para perwira tinggi non-Muslim lainnya, jelas sangat kuat didalam tubuh ABRI sejak tahun 1970/1980-an. Memasuki tahun 1990-an, hal itu menimbulkan perpecahan antara ABRI

¹Lihat juga, misalnya, “Pengelompokan ABRI Hijau dan ABRI Merah Putih pada 1990-1998”. Tersedia secara online di: <http://depoktren.com/2014/06/18/pengelompokan-abri-hijau-dan-abri-merah-putih-pada-1990-1998/> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 14 Desember 2017].

dengan Presiden Soeharto yang kebijakan politiknya mulai akomodatif terhadap umat Islam. Keretakan hubungan antara Presiden Soeharto dengan pimpinan ABRI pada masa itu nampak dalam kasus dinamika politik yang terjadi dalam tubuh GOLKAR (Golongan Karya), sebagai organisasi dan mesin politik pemerintah Orde Baru sejak tahun 1970-an (Suryadinata, 1992; Elson, 2001; Pour, 2007; dan Jenkins, 2010). Untuk mengatasi kekuatan politik “orang-orangnya Beny Murdani” didalam ABRI, Presiden Soeharto menerapkan strategi dua arah.

Pertama, Presiden Soeharto lebih meningkatkan peran politik GOLKAR, dengan mempromosikan mantan Ketua Umumnya – yang juga seorang tentara yang loyal, profesional, dan ada kedekatan dengan umat Islam – untuk maju menjadi calon Wakil Presiden RI (Republik Indonesia), yaitu Sudharmono. Sebagaimana dimaklumi bahwa walaupun didukung oleh birokrasi sipil dan tentara pada masa awal Orde Baru, GOLKAR – karena agenda politiknya yang “kering” dan teknokratis – terbukti tidak mampu mendapatkan dukungan massa yang banyak, khususnya dari umat Islam. Presiden Soeharto kemudian berupaya mengatasi kelemahan ini dengan merangkul kembali pimpinan umat dan golongan kelas menengah Muslim yang telah lama dipinggirkan. GOLKAR pada tahun 1990-an pun, karena pimpinan GOLKAR dan wakil-wakilnya di DPR/MPR (Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat) banyak diisi oleh tokoh-tokoh yang dekat dengan Islam dan berasal dari golongan menengah Muslim, dikenal sebagai *Ijo Royo-royo* (semuanya serba hijau),

yang menggambarkan menguatnya kekuatan politik Islam dalam GOLKAR dan Parlemen Indonesia, yakni DPR/MPR (Suryadinata, 1992; Anwar, 1995; Sudharmono, 1997; Elson, 2001; dan Pour, 2007).

Kedua, Presiden Soeharto, yang dikenal sebagai seorang Jawa *Abangan* dan tidak terlalu fanatik dalam beragama, dengan didukung oleh publisitas besar-besaran di media massa, untuk pertama kalinya menunaikan ibadah haji bersama keluarganya ke Mekah. Beliau dan isterinya kemudian mendapatkan nama tambahan Muslim, yakni: *Haji Muhammad Soeharto* dan *Hajah Siti Fatimah Tien Soeharto*, yang menunjukkan bahwa Presiden dan keluarganya adalah seorang Muslim yang baik dan dekat dengan umat Islam. Hal ini berbeda sekali dengan citra Presiden Soeharto dan keluarganya pada tahun 1970/1980-an, yang dinilai anti Islam atau menganut aliran kepercayaan Islam-*Kejawen* (Saidi, 1998; Elson, 2001; Mardiani, 2014; dan Sudrajat, 2017).²

Pada tahun 1990-an, Presiden Soeharto juga mendukung pembentukan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), sebuah organisasi intelektual Muslim, dengan mengangkat B.J. (Baharuddin Jusuf) Habibie – salah seorang Menteri yang sangat loyal serta pakar dalam bidang sains dan teknologi pesawat terbang – sebagai Ketua Umum ICMI. Presiden Soeharto kemudian mendorong dibukanya Bank Islam, yakni *Bank Muamalat*, di Jakarta dan cabang-cabangnya di kota-kota

²Istilah “Abangan” dan “Islam-Kejawen” merujuk kepada golongan dalam masyarakat Jawa yang kurang memiliki komitmen dalam melaksanakan ajaran dan nilai-nilai Islam. Lihat, selanjutnya, kajian yang dilakukan oleh Clifford Geertz (1981 dan 1986); Zaini Muchtarom (1988); dan M. Bambang Pranowo (2009).

lain di Indonesia, untuk memperkenalkan dan melaksanakan konsep *Bank Syariah*, yang sudah lama didambakan oleh umat Islam di Indonesia. Akhirnya, tidak tanggung-tanggung, Presiden Soeharto dan istrinya ikut pula menjadi pemegang saham terbesar dalam penerbitan surat kabar *Republika* di Jakarta, sebagai salah satu media massa yang *notabene* berbasis Islam, dengan tujuan untuk mengambil simpatik dari dunia pers dan mendukung langkahnya, dengan membuat *news & views* (berita dan opini) kepada publik agar mendukung kepentingan dan kekuasaan politik pemerintah Orde Baru (Hefner, 1995; Liddle, 1995; Makka, 1996; Ibrahim & Malik eds., 1997; Arifin, 2009; Hill, 2011; Anwar, 2012; dan Suwirta, 2015).

Walaupun pemerintah Orde Baru pada tahun 1990-an dikenal dekat dengan umat Islam, namun beberapa skandal yang berbau KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) serta bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, masih kerap terjadi (Alatas, 1985; Lubis & Scott eds., 1985; Winters, 1999; dan Fatah, 2000). Salah satunya adalah kasus BAPINDO (Bank Pembangunan Indonesia) pada tahun 1994, dimana telah terjadi pemberian kredit yang sangat besar dan tidak wajar kepada seorang pengusaha WNI (Warga Negara Indonesia) keturunan Cina, Edy Tansil alias Tan Tjoe Hong, atas rekomendasi pejabat-pejabat penting pemerintah Orde Baru, yakni Soedomo sebagai Ketua DPA (Dewan Pertimbangan Agung) serta J.B. Sumarlin sebagai Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan mantan Menteri Keuangan di Indonesia. Dalam konteks ini menjadi menarik, bagaimana surat kabar *Republika*, yang merupakan media massa berorientasikan nilai-nilai dan kepentingan

politik Islam, memberikan *news & views* (berita dan pandangan) terhadap kasus BAPINDO, yang para pelaku utamanya adalah digambarkan sebagai representasi dari kekuatan dan kepentingan pengusaha Cina dan pejabat penting Orde Baru yang non-Muslim (Majidi ed., 1994; Sjahrir, 1994; Fatah, 2000; dan Syafrian, 2015).

Artikel ini, dengan menggunakan metode historis dan pendekatan kualitatif (Kartodirdjo, 1982; Gottschalk, 1986; Ismaun, 1998; Tischer, 2000; Erianto, 2001; Bungin, 2003; Kuntowijoyo, 2003; dan Sjamsuddin, 2007), mengkaji dan menganalisis tentang: (1) Konteks Kelahiran Surat Kabar *Republika* di Jakarta pada Tahun 1990-an; (2) Surat Kabar *Republika*, Catatan Pojok "Rehat", dan Kritik Sosial terhadap Kasus BAPINDO; serta (3) Tanggapan Pemerintah dan Masyarakat terhadap Kasus BAPINDO.

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Konteks Kelahiran Surat Kabar Republika di Jakarta pada Tahun 1990-an. Dengan mempertimbangkan media adalah pesan, dan pesan adalah perpanjangan dari pikiran seseorang atau lembaga, maka dengan membaca media sebenarnya kita juga membaca arus kesadaran dan impian dalam ruang dan waktu tertentu pula. Pengembangan daya pikir media Islam, sebenarnya, tidak berhenti pada dirinya sendiri, tetapi yang paling penting justru berupaya memacu upaya rekonstruksi pemikiran Islam, bila perlu dengan mempertanyakan dan mendekonstruksi berbagai tema dan premis-premis tradisional yang diterima secara *taken for granted*. Melihat hal tersebut, ada arus kesadaran baru yang harusnya memberi nafas hidup bagi surat kabar baru yang bernama *Republika* di

Jakarta pada tahun 1990-an (Hill, 2011; Anwar, 2012; dan Masha, 2013 dan 2016).

Salah satu cara paling mudah dalam mengamati kecenderungan ini bisa dilihat dari pemilihan namanya, yang dalam batas-batas tertentu mengindikasikan pergeseran orientasi eksistensialnya: dari Islam eksklusif ke Islam inklusif, dari Islam lokatif ke Islam kosmopolit, dari Islam “sajadah” ke Islam “sya’adah”. Begitu setidaknya klaim sementara yang bisa terbayang dari para pencetusnya (Anwar, 2012; Masha, 2013; dan Ekasari, 2015). Sebagaimana nampak dalam sajian tajuk rencana nomor perdananya, surat kabar *Republika* menyatakan, sebagai berikut:

[...] Sebuah harian umum di tengah bangsa yang tengah membangun seharusnya punya wawasan kebangsaan. *Republika* lahir dengan semangat demikian. Ia diperuntukkan bagi segenap bangsa. Ia memandang setiap persoalan dengan sudut pandang yang didasarkan pada kepentingan seluruh bangsa Indonesia (*Republika*, 1991).

Hubungan antara ke-Islam-an dengan kebangsaan di Indonesia memang memerlukan pemikiran yang sungguh-sungguh. Namun bukti nyata ini telah diabadikan dalam sebuah monumen “kawin emas”, berupa pembelian saham surat kabar *Republika* di Jakarta oleh para pembesar bangsa. Dan jika ditelusuri, dengan membuka-buka kembali arsip surat kabar ini, lalu kita renungkan lembar demi lembar koran-koran besar yang pernah hidup di Tanah Air Indonesia, akan segera mengetahui bahwa masing-masing surat kabar tersebut memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Dengan perkataan lain, kekuatan-kekuatan tersebut sedikit-banyak mencerminkan juga kelemahan-kelemahan pada zamannya (Anwar, 1995;

Anwar, 2012; Masha, 2013 dan 2016; dan Ekasari, 2015).

Sementara itu, peranan pers yang ideal tidak hanya sekadar cerminan sejarah yang bersikap aktif, sadar sepenuhnya pada tarikan pasar dan jiwa zaman, melainkan bisa juga berperan sebagai pembentuk sejarah. Salah satu aspek fundamental untuk dapat memfasilitasi hal tersebut adalah kemampuan pers melengkapi dirinya dengan daya baca yang kritis terhadap tanda-tanda zaman, sebagai tumpuan untuk bertindak (*cf* Kusumah, 1981; Susanto, 1982; Wonohito, 1984; Suwirta, 2000; dan Hamad, 2004). Kelahiran surat kabar *Republika* di Jakarta pada tahun 1990-an, sungguh-sungguh berada dalam kurun waktu dan atmosfer sejarah, sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang “istimewa”, kalau tidak bisa dikatakan unik, terutama dalam empat hal.

Pertama, surat kabar *Republika* lahir pada penghujung abad kapital, di mana orang dicekam oleh kecemasan dan mimpi buruk tentang ketidakpastian abad mendatang, yang akhirnya mendorong mereka mencari ketenangan lewat “anggur” spiritualisme. Kondisi ini akan menguntungkan media massa yang bernuansa keagamaan, karena konsumen akan bersikap rekreatif terhadap muatan-muatan dan pesan-pesan keagamaan (Hill, 2011; Anwar, 2012; dan Masha, 2013 dan 2016).

Kedua, surat kabar *Republika* lahir di penghujung PJPT I (Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama) bersama kisah sukses pertumbuhan ekonomi Orde Baru (1966-1998) dengan menyisakan jurang lebar dalam kesenjangan sosial. Oleh karena itu, target *audience* dari surat kabar *Republika* adalah masyarakat kelas menengah Muslim di Indonesia. Memilih

sasaran kelas menengah dari tilikan ekonomi memang tidak mesti melulu berpihak pada kepentingan kelas ini. Tapi harus diingat bahwa godaan dan tarikan mekanis ke arah ini sangat besar. Untuk itu, selain diperlukan komitmen yang kuat pada kelas tertindas juga perlu dicari *angle* yang berbeda dalam membaca peristiwa (Ali & Effendy, 1986; Anwar, 2012; dan Masha, 2013 dan 2016).

Ketiga, surat kabar *Republika* hadir pada saat sejarah periferalisasi peran politik Islam mulai surut diterpa angin, tergantikan oleh proses repatrilisasi kaum *Santri* menuju pusat-pusat kekuasaan, membentuk gelombang *Santrinisasi* birokrasi dengan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sebagai simbolnya. Menguatnya peran politik Islam ini memerlukan resonansi alat pemancar, yang bertugas membentuk opini publik yang *favorable*. Di sinilah surat kabar *Republika* harus tampil. Namun begitu, pers berdiri untuk berlaku objektif dan untuk menyajikan pandangan yang macam-macam adanya, bukan sekadar mendidik masyarakat mengenai apa yang benar menurut ukuran politik (Anwar, 1995; Hefner, 1995; Masha, 2013; dan Ekasari, 2015).

Keempat, surat kabar *Republika* tumbuh dalam kurun waktu ketika industri pers nasional tengah bergulat untuk keluar dari berbagai permasalahan kemandegan (*stagnant*). Terutama menyangkut kelesuan, alias tidak berkembangnya, sirkulasi media cetak pada tahun-tahun terakhir 1980-an. Selain itu juga, proporsi iklan yang disedot oleh media lain, terutama televisi swasta yang jumlahnya kian bertambah pada awal tahun 1990-an. Belum lagi berkembangnya koran dan majalah mancanegara yang diproduksi

dengan teknologi canggih (Hill, 1995 dan 2011; Hidayat, 2000; dan Keller, 2009).

Dari gambaran umum tersebut di atas jelaslah, bahwa kelahiran surat kabar *Republika* di Jakarta pada tahun 1990-an, tidak hanya merupakan *renaissance* dari kelas menengah Muslim di Indonesia yang telah dipinggirkan dan dimarginalisasikan peran-peran sosial, politik, dan ekonominya sejak awal pemerintahan Orde Baru, tetapi juga memberikan harapan baru kepada golongan *Santri*, masyarakat Islam akar rumput, tentang perlunya media yang mampu menyuarakan aspirasi dan kepentingan umat Islam dalam konteks ke-Indonesia-an. Hal itu juga bisa terlaksana, mengingat sikap dan orientasi politik pemerintah Orde Baru, pada awal tahun 1990-an, mulai banyak mengakomodasi kepentingan-kepentingan sosial, politik, dan ekonomi umat Islam di Indonesia (Anwar, 1995; Hefner, 1995; Masha, 2013; dan Ekasari, 2015).

Surat Kabar Republika, Catatan Pojok "Rehat", dan Kritik Sosial terhadap Kasus BAPINDO. Pers, khususnya surat kabar dan majalah, merupakan jenis media massa yang paling efektif dan artikulatif dalam menyampaikan kritik sosial, yang sekaligus juga sebagai pengatur aspirasi sosial dan masyarakat, sebagai sarana pelepas kegelisahan, keprihatinan, dan bahkan kemarahan masyarakat, setidaknya sejak awal abad ke-20 hingga menjelang abad ke-21 (Abar, 1997; Hidayat, 2000; Hamad, 2004; dan Keller, 2009). Dalam konteks ini, surat kabar *Republika* di Jakarta yang lahir pada awal tahun 1990-an, merupakan salah satu pers Islam dan dituntut harus dapat menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat dalam

kehidupan demokrasi, selain pilar eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai lembaga-lembaga penting dalam sebuah negara-bangsa (Hill, 1995 dan 2011; Anwar, 2012; dan Masha, 2013 dan 2016).

Pers juga mempunyai tugas untuk menjaga dan mengawasi jangan sampai pejabat-pejabat pemerintahan melakukan penyalahgunaan atau melanggar batas-batas kekuasaan. Dalam konteks ini, surat kabar *Republika* pun dituntut untuk bisa menjadi *watch dog* (anjing pengawas) terhadap pelaksanaan demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru pada tahun 1990-an, sehingga mampu mengungkap setiap praktek kesewenang-wenangan dan sikap otoriter yang dilakukan pemerintah. Kekuasaan yang cenderung untuk diselewengkan, memang harus mendapat pengawasan dan kritik-kritik sosial dari pers yang mewakili kepentingan masyarakat banyak atau publik. Sikap dan pandangan kritis dari pers tersebut akan sangat ketara dalam *News & Views* yang disajikan dan dikemukakan oleh surat kabar bersangkutan, terutama dalam mensikapi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dan dinilai aktual pada zamannya (Abar, 1997; Hamad, 2004; Suwirta, 2004 dan 2015; Keller, 2009; dan Masha, 2016).

Dengan mengkaji tulisan-tulisan yang disajikan dalam surat kabar *Republika* di Jakarta, apakah dalam bentuk berita utama dan analisis berita maupun tajuk rencana dan catatan pojok, surat kabar ini dapat membentuk opini publik di masyarakat dan mengajak peran-serta masyarakat untuk bersikap kritis terhadap pemerintah yang mengatur kehidupan dan kepentingan orang banyak. Dengan demikian, diharapkan masyarakat tahu dan mengerti tentang hak dan kewajiban

mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah, yang merupakan representasi dari penyelenggara negara, harus diawasi dan dijaga oleh pers agar tetap berada dalam koridor kehidupan demokrasi yang benar demi kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat banyak (Rachmadi, 1990; Abar, 1997; Suseno, 1997; Hamad, 2004; dan Zakaria, 2010).

Surat kabar *Republika* mencoba menyikapi dan mendefinisikan peristiwa-peristiwa penting, yang melibatkan para pejabat pemerintah Orde Baru di satu sisi, dan di sisi lain juga menyangkut kepentingan masyarakat Indonesia, seperti dalam kasus mega skandal BAPINDO (Bank Pembangunan Indonesia) pada tahun 1994. Tanpa harus mendistorsi realitas sejarah, tugas berat yang amat krusial ini harus dihadapi dan dijalani oleh surat kabar *Republika* di Jakarta. Di satu sisi, surat kabar *Republika* harus tetap bisa menjaga hubungan baiknya dengan pemerintah; namun di sisi lain, surat kabar ini juga harus tetap bisa menyuarakan kepentingan masyarakat banyak, yang dalam banyak hal acapkali bertentangan dengan kepentingan politik pemerintah. Dalam konteks ini, surat kabar *Republika* perlu melengkapi dirinya dengan daya baca yang kritis terhadap tanda-tanda zaman (Keller, 2009; Anwar, 2012; dan Masha, 2013).

Untuk dapat melaksanakan tugasnya yang amat berat sebagai media massa yang ingin bersikap netral, surat kabar *Republika* dihadapkan pada satu kenyataan yang mengharuskan untuk memilih antara kepentingan masyarakat banyak atau kepentingan penguasa yang akan berimplikasi bagi kelangsungan hidupnya. Seperti diketahui bahwa saham

terbesar bagi surat kabar ini dimiliki oleh penguasa Orde Baru, yaitu Presiden Soeharto dan istrinya, ibu Tien Soeharto. Kepemilikan saham ini, tentu saja, akan mempengaruhi kebijakan redaksional yang juga menentukan kelangsungan hidup surat kabar *Republika* (Djaroto, 2000; Hidayat, 2000; Elson, 2001; Anwar, 2012; dan Masha, 2013). Kenyataan ini muncul karena pers, sebagai lembaga normatif yang kritis, akan selalu berhadapan dengan dua persoalan mendasar.

Pertama, secara internal, pers akan menghadapi dilema antara idealisme atau bisnis media. Pers industri jelas akan lebih mengembangkan bisnisnya daripada idealisme, sehingga pers tidak lagi memposisikan diri sebagai katarsis sosial. Pers tidak lebih dari lembaga-lembaga bisnis lainnya di bidang informasi. *Kedua*, faktor eksternal, kekuasaan lembaga dan masyarakat sebagai objek kritik. Pers yang kritis acapkali mendapat hambatan, bahkan serangan, dari kekuasaan negara dan masyarakat. Beberapa kasus pembreidelan sepanjang sejarah pers di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memberikan suasana yang kondusif bagi terciptanya sistem demokrasi dan jaminan bagi hak-hak pribadi warga negara. Dengan alibi harmoni atau stabilitas negara, kepentingan-kepentingan di luar negara dengan mudah dipangkas dan tidak diberi tempat untuk tumbuh (Hidayat, 2000; Zakaria, 2010; Anwar, 2012; dan Haritajaya, 2017).

Mensiasati masalah di atas, surat kabar *Republika* melengkapi dirinya dengan satu kolom catatan pojok yang diberi nama "Rehat". Kata "Rehat" bisa diartikan sebagai istirahat sejenak setelah membaca berita-berita serius dan berat; atau bisa juga diartikan sebagai selingan

dan terserah kepada setiap orang yang membacanya. Catatan pojok dalam sebuah surat kabar adalah salah satu rubrik yang ditempatkan atau diletakkan pada sudut kanan atas atau sudut kanan bawah, tetapi ada pula yang berposisi di bawah kiri atau kanan, tergantung kepada kebijakan dan kepentingan pihak Redaksi (Nugroho *et al.*, 1999; Afifi, 2005; Nesi, 2011; Anwar, 2012; dan Ekasari, 2015).

Catatan pojok, bagaimanapun, merupakan jendela sebuah penerbitan. Kata "pojok" sendiri memiliki dua karakteristik. *Pertama*, ia umumnya tidak punya kesan serius dan hal ini ditandai dengan simbol nama penulisnya. *Kedua*, ia bisa menjadi siapa saja di antara kita, sebab "pojok" memiliki kesan sebagai suara pinggiran atau arus bawah sebuah koran. Catatan pojok juga biasanya memiliki ruang yang kecil, kebiasaan guyon, dan tema-tema tidak penting yang kadang diangkatnya dengan corak jenaka. Bahkan, di beberapa surat kabar, ia benar-benar "kaum pinggiran", karena diletakkan persis di tepi bawah halaman dan tidak ada satu orang pun yang membeli surat kabar hanya karena ada atau tidak ada catatan pojok (Makah, 1977; Anshori, 2003; dan Sobur, 2008).

Penamaan "pojok" tampaknya disebabkan oleh penempatan rubrik ini di halaman surat kabar. Ruangan yang diberikan untuknya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang diberikan pada tajuk rencana, analisis berita, dan artikel opini lainnya. Catatan pojok berfungsi untuk menyentil sebuah peristiwa, kejadian, atau kebijakan yang dijalankan oleh orang-orang penting. Cara penyampaian dalam bahasa humor, ulasan, tanggapan, dan kritikan yang jenaka, atau paling tidak membuat

para pembacanya tersenyum (Makah, 1977; Erianto, 2001; Anshori, 2003; dan Sobur, 2008).

Catatan pojok “Rehat” yang digunakan oleh surat kabar *Republika* di Jakarta merupakan sarana untuk melaksanakan fungsi kritik sosialnya, karena suatu wacana kritik sosial tidak akan mungkin dapat disajikan sebagai berita utama (*headline*) surat kabar, apalagi bila yang dikritik itu para pejabat pemerintah Orde Baru, yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan Presiden Soeharto sebagai pemilik sahamnya. Catatan pojok “Rehat” ini dianggap mampu menyuarakan kritik-kritik sosial terhadap kinerja pemerintah Orde Baru, karena disajikan dengan gaya bahasa yang humoris dan santai. Penggunaan gaya bahasa yang humoris dan santai ini dikarenakan dalam media massa, kritik yang paling aman rupanya disampaikan dalam bentuk jenaka, guyonan, dan tidak langsung menuju sasaran. Kritik yang jenaka sendiri terbagi menjadi tiga macam, yakni: ironi, sinisme, dan sarkasme (*cf* Sobur, 2008; Anwar, 2012; Masha, 2013; dan Suwirta, 2015).

Dalam menanggapi kasus BAPINDO (Bank Pembangunan Indonesia) pada tahun 1994, yang telah menghilangkan uang rakyat hampir 1.3 trilyun Rupiah dan juga menyeret beberapa pejabat tinggi pemerintah Orde Baru, surat kabar *Republika* memberikan kritik-kritik sosial yang jenaka melalui catatan pojok “Rehat”. Kritik sosialnya dilakukan sedemikian rupa sehingga walaupun sangat tajam dan sarkasme, namun tetap dalam guyonan dan sindiran-sindiran yang menyegarkan. Melontarkan kritik sosial, nampaknya, memerlukan bakat tersendiri, yakni bagaimana mengangkat

sesuatu kasus ke permukaan sehingga dia muncul menjadi isu masyarakat, tanpa melukai hati yang dikritiknya. Seolah-olah yang dikritik itu bagian dari si pengkritik, ia tidak ditunjuk hidungnya, tetapi sang indera dibuatnya kembang-kempis (Makah, 1977 dan 1986; Sobur, 2008; Anwar, 2012; Masha, 2013; dan Matanasi, 2018).

Sementara itu, pada pertengahan tahun 1990-an, dalam suasana keterbukaan yang bukan cuma ramai dibicarakan, tetapi juga di sana-sini mulai marak dipraktekkan oleh media massa dalam rangka proses demokratisasi, terjadi “musibah” terhadap tiga buah media massa yang terbit di Jakarta. Sebuah majalah yang diakui semua kalangan sebagai majalah terbaik saat itu, media massa yang paling berkarakter dan berwibawa, majalah berita mingguan *Tempo* terkena pembatalan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers) oleh pemerintah Orde Baru. Dalam waktu yang sama, majalah berita mingguan lainnya, *Editor*, dan tabloid *Detik*, juga terkena “hukuman” yang sama, yaitu dibredel tanpa ampun (Prambadi *et al.*, 1994; Hill, 2011; dan Haritajaya, 2017).

Dalam konteks ini, Mufti A.S. Soegiarso *et al.* (1996) – dengan mengutip pendapat Arief Budiman, seorang cendekiawan yang kritis kepada pemerintah Orde Baru – menulis rasa keheranannya terhadap pembredelan tiga media massa penting di Indonesia, yakni *Tempo*, *Editor*, dan *Detik*, dengan menyatakan sebagai berikut:

[...] tidak ada pers yang secara jelas-jelas memprotes tindakan pemerintah Orde Baru, kecuali ketiga media korban tersebut. Mereka, lebih banyak berbicara tentang akibat sosial pemberangusan terhadap nasib karyawannya, dan juga himbauan supaya pemerintah memberikan SIUPP baru (Soegiarso *et al.*, 1996:248).

Dengan adanya pembredelan pers pada tahun 1994, maka dapat disimpulkan bahwa kebebasan pers yang berlaku di Indonesia bukan kebebasan pers yang mutlak dari aliran Liberalisme, bukan pula kebebasan pers aliran Komunis yang membawa pers kepada garis partai yang berkuasa. Dalam pandangan Oemar Seno Adji (1974), dan para ahli hukum lainnya, bahwa hukum yang bersumberkan kepada Pancasila adalah bermaksud mengadakan keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi. Maka persoalan kebebasan yang diartikan sebagai “kebebasan menyatakan pendapat” harus dilihat dalam hubungan yang seimbang dengan tanggung jawab, sehingga tidak terjadi kehilangan keseimbangan dengan lebih mengutamakan kebebasan atau tanggung jawab sebagai unsur utamanya. Keduanya sama-sama esensial dan harmonis, tanpa adanya *privilege* pada kebebasan atau tanggung jawab masing-masing (*cf* Adji, 1974; Prambadi *at al.*, 1994; McChesney, 1998; Hill, 2011; dan Haritajaya, 2017).

Agar tidak mengalami nasib yang sama dengan tiga media yang dibredel oleh pemerintah Orde Baru, maka catatan pojok “Rehat” menjadi begitu penting sebagai sarana untuk menuangkan wacana kritik sosial bagi surat kabar *Republika* di Jakarta. Wacana kritik sosial dari catatan pojok “Rehat” ini disajikan dalam bentuk satu kalimat sederhana dan pendek, yang berisi sindiran cukup tajam, tetapi tidak kasar dan masih dalam batas yang wajar dan normal. Sindiran ini ditulis pula sebagai komentar atas suatu pernyataan pejabat atau seseorang, dan/atau pula ketika dikeluarkannya suatu kebijakan dan menyangkut kinerja pemerintah (Keller,

2009; Anwar, 2012; Masha, 2013; dan Ekasari, 2015).

Dalam kasus BAPINDO (Bank Pembangunan Indonesia), yang melibatkan beberapa pejabat tinggi negara, catatan pojok “Rehat” memuat wacana-wacana kritik sosial yang tajam terhadap kasus ini. Tanpa perlu menyebutkan nama seseorang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, masyarakat pembacanya sudah bisa langsung menebak sendiri, tanpa harus diucapkan kembali. Yang menjadi perhatian utama catatan pojok “Rehat” dalam kasus BAPINDO adalah tentang surat *katebelece*, yang telah meloloskan pencairan kredit sebesar 1.3 triliun Rupiah. Hal ini menjadi masalah besar, terutama tentang siapa tokoh di balik dikeluarkannya “surat sakti” tersebut (Basri, 1994; Sjahrir, 1994; Sumarwan, 2005; dan Matanasi, 2018).

Beberapa bagian dari kasus ini, yang sempat disikapi secara kritis oleh catatan pojok “Rehat”, di antaranya adalah saat Direktur Utama BAPINDO, Towil Heryoto, dibebastugaskan dari jabatannya oleh Menteri Keuangan, Mar’ie Muhammad. Dalam hal ini, catatan pojok “Rehat” memberikan komentar yang kritis namun jenaka, sebagai berikut:

*Towil Heryoto dibebastugaskan sebagai
Dirut BAPINDO.*

**Ini tentu baru bagian kecil dari
(hadiah) Lebaran 94.
(Republika, 17/3/1994).**

Kalimat pernyataan yang ditebalkan di atas adalah tanggapan “Rehat” tentang langkah yang diambil oleh Menteri Keuangan, Mar’ie Muhammad. Catatan pojok “Rehat” memandang bahwa pembebastugasan Towil Heryoto, sebagai Direktur Utama BAPINDO (Bank Pembangunan Indonesia), adalah sebuah

hadiah yang diharapkan dapat sedikit menggembirakan pada hari raya Lebaran di tahun 1994, karena hal itu dianggap sebagai salah satu bentuk keseriusan dari pemerintah Orde Baru dalam menangani dan menyelidiki kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) tersebut lebih lanjut. Hal di atas senada dengan yang diungkapkan oleh Biro Hukum dan HUMAS (Hubungan Masyarakat) Departemen Keuangan, Agus Haryanto, dalam siaran persnya di Jakarta, yang menyebutkan bahwa pembebasan sementara itu berlaku mulai tanggal 16 Maret 1994. Menurut Agus Haryanto pula, langkah itu ditempuh dalam rangka memperlancar pemeriksaan skandal kredit 1.3 triliun Rupiah di BAPINDO yang melibatkan Eddy Tansil alias Tan Tjoe Hong, bos GKG (*Golden Key Group*); serta untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional BAPINDO sehari-hari (Basri, 1994; Majidi ed., 1994:95; Sjahrir, 1994; Sumarwan, 2005; Ruslan, 2012; dan Matanasi, 2018).

Wacana kritik sosial juga kembali ditulis oleh “Rehat” ketika sebelumnya, karena alasan-alasan tertentu, berita utama halaman 1 surat kabar *Republika* untuk edisi hari Jumat, 11 Maret 1994, sekitar pukul 23.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), dicabut. Berita tersebut memuat bukti-bukti bahwa Soedomo, Ketua DPA (Dewan Pertimbangan Agung) pada masa itu dan mantan Wakil PANGKOPKAMTIB (Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban) pada tahun 1970/1980-an, benar-benar telah membuat surat yang tidak hanya sekadar memuji-muji Eddy Tansil alias Tan Tjoe Hong kepada Direksi BAPINDO dan Direktur Utama Bank Exim. Tapi dalam surat-surat tersebut,

Soedomo jelas-jelas secara tersirat ikut mengarahkan pembentukan sindikasi pinjaman. Pencabutan izin terbit tersebut tidak menyurutkan langkah surat kabar *Republika* untuk terus memuat informasi-informasi terbaru dari kasus BAPINDO, yang menjadi sorotan utama masyarakat pada waktu itu (Majidi ed., 1994; dan Ruslan, 2012).

Hal tersebut dibuktikan ketika ada tanya-jawab antara JAMPIDSUS (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), A. Soetomo, dengan pers pada tanggal 13 April 1994, yang mengungkapkan bahwa penahanan terhadap Syahrizal dan F.X. Bambang Kuntjoro, karena Tim Jaksa telah menemukan data, yakni keduanya menyetujui penambahan kredit bagi Eddy Tansil. Sementara itu, Syahrizal dan F.X. Bambang Kuntjoro sendiri mengaku kepada Tim Jaksa bahwa penambahan kredit terhadap Eddy Tansil sebesar 228.4 juta Dollar AS (Amerika Serikat), karena ada tekanan dari pihak luar (Majidi ed., 1994:179-180; Sjahrir, 1994; dan Matanasi, 2018). Menanggapi peristiwa tersebut, kontak saja catatan pojok “Rehat” dalam surat kabar *Republika* di Jakarta memberikan kritik sosial dan sindiran yang tajam, sebagai berikut:

Dua tersangka kasus BAPINDO mengaku meloloskan kredit, karena ada tekanan. Nah, siapa yang menekan, pasti lupa ... (Republika, 13/4/1994).

Sindiran dan kritik sosial yang diungkapkan oleh catatan pojok “Rehat” tersebut tentunya ingin mengingatkan para pembaca surat kabar *Republika* terhadap surat *katebelece* yang ikut melancarkan cairnya kredit kepada Eddy Tansil; dan siapa yang membuatnya pasti sudah bukan menjadi rahasia umum lagi.

Kritik sosial dan sindiran yang dilakukan oleh catatan pojok “Rehat” ini sedikitnya dapat mengobati kekecewaan masyarakat, ketika sebelumnya berita utama yang sedianya memuat bukti-bukti keterlibatan Soedomo dalam surat kabar *Republika* dicabut dan dibatalkan penerbitannya atas desakan dari pemerintah.³ Maka kritik berikutnya tentang kasus BAPINDO dari catatan pojok “Rehat” adalah sebagai berikut:

Indonesia tak kenal istilah mafia pengadilan, kata Jaksa Agung.

Pantas, karena tak dikenal, mereka bebas gentayangan.

Dua lagi mantan pejabat BAPINDO dijadikan tersangka.

Terus adegan puncaknya kapan?
(*Republika*, 15/4/1994).

Dua pernyataan di atas ditujukan untuk menyindir kinerja pemerintah Orde Baru dan juga Kejaksaan Agung yang terkesan lambat dalam menangani kasus BAPINDO (Bank Pembangunan Indonesia), sehingga masyarakat merasa jenuh karena kasus ini tidak kunjung selesai. Wacana kritik sosial ini juga dibuat untuk menanggapi pernyataan Jaksa Agung, Singgih, yang menyatakan bahwa tiga pejabat tinggi akan dijadikan saksi dalam kasus skandal kredit 1.3 triliun Rupiah di BAPINDO. Singgih menegaskan bahwa dalam proses pengadilan nanti akan berjalan sesuai hukum yang berlaku dan tidak akan memberikan perlindungan khusus, sekalipun Soedomo dan J.B. Sumarlin sebagai pejabat tinggi negara. Untuk menghadirkan seorang pejabat tinggi negara ke pengadilan sebagai saksi,

menurut ketentuan undang-undang, haruslah sejjin dari Presiden Soeharto (Elson, 2001; Sitompul, 2005; dan Matanasi, 2018).

Beberapa wacana kritik sosial di atas hanyalah sebagian kecil saja dari wacana-wacana kritik yang pernah dimuat oleh catatan pojok “Rehat”, karena *Republika* di Jakarta termasuk salah satu surat kabar yang menyorotinya secara intens dari sejak awal terungkapnya kasus ini ke permukaan. Hal ini juga sekaligus mencerminkan kenyataan bahwa *Republika* telah dapat memfungsikan dirinya sebagai salah satu media massa yang demokratis dan mampu menjadi pengawas pemerintah dalam kinerjanya sehari-hari, serta hanya menunjukkan pula bahwa hanya pers yang netral dan menjaga objektivitas yang akan mampu melakukan kritik sosial secara baik dan objektif (Keller, 2009; Anwar, 2012; dan Masha, 2013).

Meskipun tingkat kritisisme catatan pojok itu ditentukan oleh visi dan keberanian media massa untuk mengungkapkan realitas sosial, namun dalam konteks ini, surat kabar *Republika* di Jakarta memiliki catatan pojok yang lebih kritis dan berani bila dibandingkan dengan catatan pojok surat kabar *Kompas* di Jakarta dan *Pikiran Rakyat* di Bandung, Jawa Barat, misalnya (cf Iskantini, 2001; Anshori, 2003; Suwarta, 2004; Keller, 2009; Hill, 2011; Anwar, 2012; dan Masha, 2013).

Secara umum, ketidakkritisan media massa – termasuk dalam penulisan catatan pojoknya – lebih disebabkan oleh “ketakutan” pers terhadap badai yang akan diterima dari kritik sosialnya tersebut, terutama adanya pencabutan SIUPP (Surat Izin Usaha dan Penerbitan Pers) oleh pemerintah. Pada umumnya, para jurnalis menahan diri atau mencari

³Sorotan masyarakat dan kritik sosial terhadap sepak-terjang Soedomo pada masa Orde Baru (1966-1998) dapat dibaca lebih lanjut dalam Julius Pour (1997) dan Heri Ruslan (2012).

jalan lain untuk melakukan kritik, tanpa harus mengorbankan surat kabarnya. Dalam konteks ini, Rosihan Anwar (1983), wartawan senior Indonesia, sebagaimana dikutip juga dalam Dadang Anshori (2003), menyebutkan bahwa dalam melakukan kritik sosialnya, banyak media yang melakukan kritik “gaya kepiting”. Ada saatnya tiarap, ada saatnya menembak, atau kalau mengkritik pun dengan jalan zig zag dan miring kesamping, menghindari jeratan dari pihak penguasa (cf Anwar, 1983; Anshori, 2003; dan Laily, 2016).

Memang, nasib pers pada zaman Orde Baru tidak lebih dari bagaimana menyiasati diri agar selamat dalam berbagai jepitan kekuasaan. Di saat kran keterbukaan dibuka lebar-lebar pada awal tahun 1990-an, pers berhamburan dengan agenda-agenda yang diarsipkannya. Namun di saat keterbukaan itu menyempit, dia pun harus hati-hati dari sasaran tembak kekuasaan. Hal ini sudah dapat dilakukan oleh surat kabar *Republika* di Jakarta yang telah berani memberikan kritikan-kritik sosial dan sindiran yang tajam terhadap kasus BAPINDO, yang menjadi sorotan utamanya selama tahun 1994 (Basri, 1994; Sjahrir, 1994; Wijaya, 2002; Keller, 2009; Anwar, 2012; dan Masha, 2013).

Tanggapan Pemerintah dan Masyarakat terhadap Kasus BAPINDO.

Terungkapnya kasus mega skandal BAPINDO (Bank Pembangunan Indonesia) oleh seorang wakil rakyat di DPR/MPR (Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan ia sendiri merupakan wakil dari DPR. Wakil rakyat tersebut adalah A.A. Baramuli, yang dengan berani tampil ke depan mengungkap kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang dilakukan oleh Eddy

Tansil. Dia dianggap berani, karena pada saat itu semua orang bungkam dan tidak mau mengemukakan kebenaran secara terbuka dan takut kepada pemerintahan Soeharto. A.A. Baramuli tidak sekedar membeberkan skandal BAPINDO yang melibatkan pengusaha WNI (Warga Negara Indonesia) keturunan Cina, yakni Eddy Tansil, tapi juga memiliki data dan sumber yang sangat akurat, baik dari dalam DPR maupun dari luar DPR (Basri, 1994; Sjahrir, 1994; Muhammad, 1994; Kusuma ed., 2000:41; Holloway ed., 2002; dan Matanasi, 2018).

Kasus BAPINDO ternyata menyita banyak sekali perhatian masyarakat, baik dari kalangan bankir, usahawan, politisi, dan mahasiswa maupun masyarakat awam. Perhatian yang besar seperti ini memang wajar, karena menyangkut uang negara yang cukup besar dan juga menyeret beberapa nama pejabat tinggi negara yang sangat dihormati. Adanya kasus besar dan menggemparkan seperti ini, sudah barang tentu, menjadi *moment* yang tepat bagi media massa untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai *watch dog* bagi jalannya pemerintahan, sekaligus menggunakan haknya untuk dapat mengkritik agar dapat mengingatkan pemerintah tentang penyimpangan yang terjadi dan ini menyangkut rakyat Indonesia. Bukan hanya sekedar menjalankan fungsi persnya saja, tapi berita-berita besar seperti ini juga secara tidak langsung dapat menaikkan oplah penjualan surat kabar, dan ini berarti pula pemasukan terhadap kas bagi surat kabar berkenaan (Abar, 1997; Sudibyo, 2001; Anwar, 2012; Ruslan, 2012; dan Masha, 2013).

Begitu juga dengan surat kabar *Republika* di Jakarta, yang sangat intens dalam memberitakan kasus BAPINDO.

Selain selalu menjadikan kasus ini sebagai berita utama, surat kabar *Republika* – melalui catatan pojoknya, “Rehat” – juga memberikan kritik yang cukup tajam, namun tetap jenaka. Diharapkan dengan berita dan kritik yang dimuatnya itu, surat kabar *Republika* dapat ikut membentuk opini publik yang berbeda-beda di masyarakat (Keller, 2009; Anwar, 2012; Masha, 2013; dan Ekasari, 2015).

Berbagai lapisan masyarakat juga memberikan tanggapan yang berbeda-beda, tapi dari kesemuanya memuat tujuan yang sama, yaitu tuntutan agar pemerintah segera bertindak dan menyelesaikan kasus BAPINDO dengan serius dan para pelakunya diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Masyarakat menganggap bahwa kasus BAPINDO adalah sebuah kejahatan besar yang membuat masyarakat kecil semakin menderita (Basri, 1994; Sjahrir, 1994; Muhammad, 1994; Asikin, 1997; Holloway ed., 2002; Wijaya, 2002; dan Matanasi, 2018).

Sementara itu, Menteri Keuangan, Mar’ie Muhammad (2003), mengeluarkan surat untuk menolak *katebelece*. Surat itu nantinya dapat dipakai sebagai dasar oleh pengelola bank-bank pemerintah untuk menolak campur tangan dari siapa pun – termasuk Menteri Keuangan – kapan pun dan melalui media apa pun. Mar’ie Muhammad (2003) menjelaskan surat penolak bala itu dalam Rapat Kerjanya dengan Komisi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di DPR, yang dipimpin oleh Ketua Komisinya, Afif Ma’roef. Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa surat tersebut bukan dikeluarkan karena terungkapnya skandal kredit sebesar 1.3 trilyun Rupiah di

BAPINDO. Tapi hanya dimaksudkan sebagai penegasan ulang terhadap fungsi dan wewenang para Direksi dan Dewan Komisaris di bank-bank pemerintah. Menteri Keuangan kemudian menjelaskan bahwa kredit bermasalah yang menggerogoti perbankan nasional sudah sangat memprihatinkan (*cf* Majidi ed., 1994:71; Holloway ed., 2002; Wijaya, 2002; Muhammad, 2003; dan Matanasi, 2018).

Ketua Umum DPP GOLKAR (Dewan Pengurus Pusat Golongan Karya), Haji Harmoko, mengakui bahwa kasus skandal BAPINDO itu telah mencoreng dan menodai citra GOLKAR di mata masyarakat Indonesia (Ali & Novianto, 1997; Busye, 1997; dan Rahmah, Suwirta & Kamsori, 2016). Lebih lanjut Ketua Umum GOLKAR menyatakan, sebagai berikut:

Kita tidak ingin citra GOLKAR dirusak dan dinodai oleh kader yang telah menjadi aparatur negara. Oleh karena itu, GOLKAR mendukung penuntasan kasus itu tanpa pandang bulu, karena bagi GOLKAR keadilan harus ditegakkan. Selain itu, DPP GOLKAR akan selalu meminta kader yang duduk di DPR agar meningkatkan fungsi kontrol terhadap aparatur negara yang menyalahi hukum. Sebab, tindakan menyalahi hukum merupakan pelanggaran disiplin organisasi sehingga dapat merusak nama GOLKAR (dalam Majidi ed., 1994:156).

Di Jakarta, organisasi-organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung, yaitu HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia), PMKRI (Persatuan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia), dan GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), melalui siaran persnya, menyatakan keprihatinan atas kasus yang melanda dunia perbankan nasional. Kelompok

ini dalam sikapnya mendukung upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan oleh DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Majidi ed., 1994; Culla, 1999; Djiwandono, 2001; Wijaya, 2002; dan Lebe, 2018).

Selain itu, kelompok mahasiswa juga mendesak Kejaksaan Agung untuk mengajukan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus BAPINDO (Bank Pembangunan Indonesia). Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kelompok ini meminta kepada para pejabat yang terbukti bersalah untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Di samping itu, kelompok mahasiswa juga mendesak DPR RI agar menggunakan Hak Inisiatif untuk merevisi UU (Undang-Undang) Perbankan Nasional, khususnya yang menyangkut pasal kerahasiaan bank (Majidi ed., 1994; Asikin, 1997; Culla, 1999; Djiwandono, 2001; dan Wijaya, 2002).

Aksi serupa juga terjadi di kota Yogyakarta, di mana sekitar 3,000 mahasiswa dan pelajar Yogyakarta melakukan unjuk rasa menentang terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) antara pejabat penguasa dan pengusaha, seperti yang tercermin dalam kasus skandal kredit di BAPINDO. Unjuk rasa tersebut berlangsung di kampus UGM (Universitas Gadjah Mada). Mereka yang menamakan dirinya sebagai kelompok GPUR (Gerakan Pengembalian Uang Rakyat) tersebut menuntut agar semua orang yang terlibat dalam kasus skandal kredit 1.3 trilyun Rupiah di BAPINDO itu ditindak tegas. Sementara itu, sekitar 20 orang yang tergabung dalam kelompok BMMB-PEU (Barisan Mahasiswa Muslim Bandung untuk Penyelamatan Ekonomi Umat) melakukan demonstrasi di Gedung

MPR/DPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat) di Jakarta. Mereka meneriakkan yel-yel agar pemerintah Orde Baru bertindak lebih tegas dalam mengatasi kasus kredit macet kepada Edy Tansil, bos perusahaan *Golden Key* tersebut (Majidi ed., 1994:70; Culla, 1999; dan Kusuma ed., 2000).

Dalam konteks ini, surat kabar *Republika* di Jakarta menurunkan berita sebagai berikut:

[...] puluhan pemuda dan mahasiswa Cianjur mendatangi gedung DPRD Tingkat II Cianjur. Mereka, yang menamakan diri Gerakan Anti Korupsi dan Kolusi (GAK-GAK), hari itu berniat menyampaikan sikap soal kredit macet dan kemelut di BAPINDO. Dalam tuntutanannya, GAK-GAK minta agar pemerintah mengusut secara tuntas kasus kredit macet yang sedang melanda BAPINDO serta lembaga perbankan lainnya yang mengganggu keuangan negara dan merugikan masyarakat. Menurut catatan GAK-GAK, jumlah kredit macet di sejumlah bank pemerintah mencapai 20 trilyun Rupiah, dimana 1.3 trilyun Rupiah di antaranya diberikan BAPINDO kepada PT Golden Key.

“Karena itulah kami mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai kredit yang diberikannya itu”, kata Suhendra kepada *Republika*, usai menemui wakil rakyat. Secara ksatria, menurut ketua delegasi GAK-GAK, Sudomo sebaiknya segera mengundurkan diri selaku Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Langkah ini, menurutnya, agar pihak Kejaksaan Agung dapat secara leluasa melakukan penyidikan tanpa intervensi dari lembaga-lembaga manapun (*Republika*, 21/5/1994).

Dalam menanggapi kasus BAPINDO (Bank Pembangunan Indonesia), seperti halnya banyak pihak, Ali Sadikin, yang juga teman baik Soedomo dalam dinas di Angkatan Laut, memohon agar Soedomo sebagai Ketua DPA (Dewan Pertimbangan Agung) bersedia mengundurkan diri dari jabatannya (Sadikin & Ramadhan, 1995; dan Pour, 1997). Dalam hal ini, Ali Sadikin mempertimbangkan bukan soal kemudahan pemeriksaan oleh Kejaksaan

Agung semata, tetapi juga menyangkut citra “lembaga agung” yang berfungsi memberi nasihat kepada Presiden, yang kini dipimpin oleh Soedomo. “*Jadi, pengunduran diri Sudomo itu untuk menyelamatkan wibawa DPA*”, katanya sebagaimana juga dikutip oleh surat kabar *Republika* di Jakarta (22/5/1994).

Kelompok Petisi 50 sendiri, di mana Ali Sadikin terlibat di dalamnya, setelah mengkaji secara seksama skandal itu berkesimpulan bahwa Soedomo memang terlibat. Dalam hal ini Soedomo, seperti dikatakan oleh Wachdiat Sukardi, salah satu anggota Kelompok Kerja Petisi 50, dinilai telah menyalahgunakan jabatan sebagai Menko POLKAM (Menteri Koordinator Politik dan Keamanan) dan Ketua DPA dengan mengeluarkan surat *katebelece*. Dengan perbuatannya itu, maka “*nama baiknya sudah tercemar*,” kata Wachdiat Sukardi (dalam Majidi ed., 1994:162).

Skandal kredit macet sebesar 1.3 triliun Rupiah di BAPINDO, yang diduga melibatkan pejabat bank, pejabat tinggi negara, serta bos *Golden Key Group*, Eddy Tansil, akhirnya juga mendapat tanggapan dari Bank Dunia. Dalam pertemuan dengan para pejabat tinggi ekonomi Indonesia di Departemen Keuangan, Presiden Bank Dunia, Lewis Preston, meminta agar pemerintah Indonesia meningkatkan konsolidasi sistem perbankan nasional. Himbauan Lewis Preston itu disampaikan dengan maksud agar masalah-masalah yang menggelayuti sistem perbankan di Indonesia dapat diselesaikan secepatnya. Bank Dunia memang punya komitmen terhadap kondisi perbankan di Indonesia karena sebagai lembaga donor, Bank Dunia memang pernah menyuntikan dana sebesar 300 juta Dollar AS (Amerika

Serikat) kepada bank-bank pemerintah Indonesia pada tahun 1992, yang dipakai untuk meningkatkan permodalan bank (Basri, 1994; *Republika*, 23/5/1994; Wijaya, 2002; Sitompul, 2005; Sumarwan, 2005; dan Matanasi, 2018).

Untuk ketiga kalinya, kelompok mahasiswa di Yogyakarta, yang menamakan dirinya GAPURA (Gerakan Pengembalian Uang Rakyat), menggelar aksi unjuk rasa. Serupa dengan dua aksi terdahulu, tema pokok demonstrasi masih berkisar pada masalah kredit macet di BAPINDO. Dalam pernyataannya, mereka menuntut agar Kejaksaan Agung menyidik tuntas perkara tersebut. Diharapkan, dengan terjaringnya Eddy Tansil, selaku tersangka langsung masalah ini, pihak Kejaksaan Agung tidak lantas menghentikan pengusutan. Tapi juga harus memeriksa para “oknum” pejabat yang diduga juga terlibat dalam masalah tersebut. Dalam pernyataan yang dibacakan dalam aksi itu, kelompok GAPURA menyerukan agar pihak Kejaksaan Agung mengusut oknum pejabat yang telah membantu mencuri uang rakyat. GAPURA juga akhirnya menuntut agar Soedomo dan J.B. Sumarlin mundur dan menyerahkan diri kepada pihak Kejaksaan Agung (Majidi ed., 1994; *Republika*, 24/5/1994; Pour, 1997; dan Winarno, 2013).

Tuntutan agar para pejabat yang terlibat dalam skandal kredit macet di BAPINDO muncul paling sering dari Bandung. Dalam hal ini, surat kabar *Republika* banyak memuat berita-berita tentang protes-protes mahasiswa dan pelajar dari Bandung tersebut. Bentrokan fisik pun terjadi ketika sekitar 200 mahasiswa dan pemuda dari Bandung dihadang petugas keamanan dari satuan polisi dan tentara saat mereka

hendak ke gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Jawa Barat di Bandung. Mereka, yang menamakan diri AGPMB (Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Bandung), menuntut agar Ketua DPA (Dewan Pertimbangan Agung), Soedomo; mantan Menteri Keuangan dan Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), J.B. Sumarlin; dan mantan Menteri Muda Keuangan, Nasruddin Sumintapura, diadili. Ketiga pejabat tersebut dinilai oleh mereka terlibat dan bertanggung jawab atas terjadinya skandal kredit macet sebesar 1.3 trilyun Rupiah di BAPINDO, yang diberikan kepada Eddy Tansil alias *Tan Tjoe Hong* (Basri, 1994; Majidi ed., 1994; *Republika*, 19/5/1994; Pour, 1997; dan Winarno, 2013).

Setelah berkali-kali gagal menggelar aksi protes skandal BAPINDO di gedung DPRD Jawa Barat, sekitar 2,000 mahasiswa Bandung kemudian membacakan puisi-puisi keprihatinan. Selain soal BAPINDO, mereka juga mengadakan mimbar bebas di kampus UNISBA (Universitas Islam Bandung) dan juga membacakan pernyataan sikap mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadir dan ikut membaca puisi di tengah-tengah mahasiswa itu adalah W.S. Rendra, penyair kondang yang dicekal oleh pemerintah Orde Baru di Yogyakarta beberapa waktu sebelumnya. Pada aksi tersebut mereka, antara lain, mengulang tuntutan agar tiga pejabat tinggi di Indonesia, yaitu Soedomo, J.B. Sumarlin, dan Nasruddin Sumintapura diadili (Basri, 1994; Majidi ed., 1994; *Republika*, 20/5/1994; Pour, 1997; Sukandi ed., 1999; dan Winarno, 2013).

Paparan-paparan di atas hanyalah merupakan sebagian kecil dari tanggapan-tanggapan yang diberikan masyarakat

atas kasus skandal BAPINDO, yang secara intensif direkam oleh surat kabar *Republika* di Jakarta. Kasus yang berujung mengecewakan ini hanya berakhir sampai vonis dikeluarkan terhadap Eddy Tansil sebagai pelaku utama dalam kasus BAPINDO. Bahkan A.A. Baramuli, orang yang pertama kali mengungkap kasus ini ke permukaan, adalah juga merasa kecewa dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Eddy Tansil. Hukuman vonis tersebut dirasa sangat minim dan ringan, yakni tidak dipenjara seumur hidup atau bahkan dihukum mati misalnya, agar hukum punya efek jera kepada para koruptor lainnya (Majidi ed., 1994; Sjahrir, 1994; Kusuma ed., 2000; dan Ruslan, 2012).

Apa yang mencemaskan A.A. Baramuli adalah bahwa akibat vonis ringan tersebut jangan-jangan orang akan berani mencoba-coba perbuatan seperti yang dilakukan oleh Eddy Tansil. Kemudian A.A. Baramuli juga mengingatkan bahwa berdasarkan hukum, maka siapapun pejabat yang terbukti membantu seseorang meraih keuntungan dengan cara tidak benar, baik si pejabat memperoleh imbalan atau tidak, bisa dihukum karena sudah jelas tertulis dalam UU (Undang-Undang) No.3 Tahun 1971 tentang Korupsi, yang juga merupakan produk hukum dari pemerintah Orde Baru (Asikin, 1997; Kusuma ed., 2000; Muhammad, 2003; dan Syafrian, 2015).

Tapi konteks kasus BAPINDO, yang melibatkan tiga pejabat penting pada masa Orde Baru tahun 1994 itu, harus dilihat dalam persaingan politik dari kelas menengah Muslim yang tengah pasang pada tahun 1990-an, yang pada masa-masa awal Orde Baru di tahun 1970/1980-an

mengalami surut dan dimarginalisasikan. Bukanlah suatu kebetulan bahwa tokoh-tokoh yang terlibat dalam kasus BAPINDO adalah Eddy Tansil, sebagai representasi penguasa WNI (Warga Negara Indonesia) keturunan Cina; Soedomo dan J.B. Sumarlin, sebagai representasi pejabat atau penguasa Orde Baru yang non-Muslim; serta Nasruddin Sumintapura, sebagai representasi dari birokrat yang kurang komit atau abai dengan kepentingan politik umat Islam. Dalam konteks media massa, juga jelas menggambarkan bahwa surat kabar *Republika* di Jakarta, yang dibidani oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), ingin menunjukkan peran dan persaingan politiknya dengan media arus utama pada masa Orde Baru, yang didominasi oleh golongan non-Muslim, seperti surat kabar *Kompas* dan *Suara Pembaharuan*; atau yang netral terhadap agama Islam, seperti surat kabar *Media Indonesia* (Aly, 1986; Rachmadi, 1990; Anwar, 1995; Hefner, 1995; Keller, 2009; Kasman, 2010; Hill, 2011; dan Masha, 2013 dan 2016).

KESIMPULAN ⁴

Dari beberapa pokok pikiran yang telah diuraikan mengenai wacana-

⁴*Sebuah Pengakuan:* Artikel ini, sebelum diterbitkan dan diubah-suai dalam bentuknya sekarang, merupakan ringkasan untuk bahan perkuliahan Sejarah Orde Baru dan Reformasi (1966-1998) di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung. Saya mengucapkan terima kasih kepada Farida Sarimaya, M.Si. (*Allahuyarhamah*); Moch Eryk Kamsori, S.Pd.; dan Iing Yulianti, M.Pd., tiga orang Asisten Dosen saya, yang sudah banyak membantu proses perkuliahan dengan baik dan lancar. Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada para Mahasiswa yang mengontrak matakuliah tersebut, dimana banyak pertanyaan dan komentar mereka untuk memperbaiki dan mempertajam analisis dalam artikel ini. Walau bagaimanapun, seluruh isi dan interpretasi dalam tulisan ini berada dibawah tanggung jawab akademik saya secara pribadi, dan tidak ada hubungan-kaitnya dengan mereka.

wacana kritik sosial catatan pojok “Rehat” miliki surat kabar *Republika* di Jakarta, yang menyoroti kasus mega skandal BAPINDO (Bank Pembangunan Indonesia) pada tahun 1994 dan melibatkan beberapa pejabat tinggi negara, serta menghabiskan uang rakyat sebesar kurang-lebih 1.3 trilyun Rupiah, maka dapat dikatakan bahwa masalah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di Indonesia pada pemerintahan Orde Baru tahun 1990-an masih wujud. Masalah KKN ini akan menjadi isu politik utama hingga keruntuhan pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998.

Kelahiran surat kabar *Republika* pada tahun 1990-an berada dalam kurun waktu dan atmosfer sejarah, sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang begitu kompleks. Di satu pihak masyarakat, khususnya umat Islam, dicekam oleh rasa ketidakpastian tentang nasib mereka di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mereka mencari ketenangan dengan segala sesuatu yang bersifat spiritualisme dan keagamaan. Maka surat kabar *Republika* hadir sebagai media massa yang bernuansa keagamaan dan diuntungkan dengan keadaan ini. Sementara di sisi lain, surat kabar *Republika* juga hadir pada saat sejarah mencatat peranan politik umat Islam di Indonesia mulai menguat ke tingkat kekuasaan birokrasi dengan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sebagai simbolnya.

Di sinilah surat kabar *Republika* hadir untuk memperkuat peran politik Islam yang memerlukan resonansi alat pemancar yang bertugas membentuk opini publik yang *favourable*. Namun begitu, sebagai media massa, maka surat kabar *Republika* harus tetap dituntut untuk bersikap objektif. Surat kabar *Republika* juga

tumbuh di saat industri pers nasional dihadapkan pada berbagai masalah kemandegan yang disebabkan oleh persaingan dengan media massa elektronik yang lebih canggih dan dapat menyedot iklan lebih banyak, serta semakin berkembangnya koran dan majalah luar negeri yang diproduksi lebih canggih.

Surat kabar *Republika*, sebagai media massa yang ingin bersikap netral, dihadapkan pada persoalan yang mendasar, yakni: secara internal, media massa harus memilih antara idealisme atau bisnis media; serta secara eksternal, pers yang kritis acapkali mendapat hambatan, bahkan serangan, dari kekuasaan negara dengan alibi harmoni atau stabilitas negara. Mensiasati hal tersebut, surat kabar *Republika* melengkapi diri dengan satu kolom catatan pojok yang diberi nama “Rehat”. Nama “Rehat” digunakan oleh surat kabar *Republika* sebagai sarana untuk melaksanakan kritik sosialnya kepada masyarakat, pemerintah, dan negara.

Namun, karena *Republika* merupakan surat kabar yang kepemilikan saham terbesarnya dimiliki oleh penguasa Orde Baru, yaitu Presiden Soeharto, maka tidak mungkin ianya dapat secara terus terang melakukan kritik-kritik sosial, apalagi jika menyangkut para pembantu Presiden sebagai sasaran kritik utamanya. Jika hal itu dilakukan, maka sama halnya dengan menggali kubur sendiri, dalam artian bahwa pers bisa terkena pembredelan oleh pemerintah Orde Baru. Dalam konteks ini, catatan pojok “Rehat”, yang disajikan dalam bentuk satu kalimat pendek dan sederhana namun berisi sindiran yang cukup tajam tetapi tidak kasar dan masih dalam batas yang wajar, merupakan cara mengkritik surat kabar *Republika* kepada pihak penguasa.

Dalam menyoroti kasus kredit macet di BAPINDO, misalnya, yang melibatkan beberapa pejabat tinggi negara, maka catatan pojok “Rehat” dalam surat kabar *Republika* mampu menyajikan wacana-wacana kritik sosial yang cukup tajam dan jenaka. Kasus ini memang merupakan salah satu bentuk yang paling jelas tentang praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) pemerintah Orde Baru pada tahun 1990-an. Peristiwa ini sempat menjadi sorotan utama beberapa media massa, salah satunya adalah surat kabar *Republika*. Berita-berita utama yang disajikan dan juga kritik-kritik sosial yang tajam dalam catatan pojok “Rehat” disampaikan oleh surat kabar ini kepada masyarakat luas. Akibat pemberitaan dan pandangan yang telah diberikan oleh surat kabar *Republika*, tentu saja, telah memunculkan respons atau tanggapan yang berbeda-beda di dalam masyarakat dari berbagai lapisan dan golongan. Terutama sekali respons itu datang dari golongan politisi dan dari pihak pemerintah sendiri, serta insan akademis yang dalam hal ini diwakili oleh para mahasiswa dari berbagai PT (Perguruan Tinggi) di Indonesia.

Para politisi menganggap bahwa kasus BAPINDO telah mencemari dunia politik di Indonesia, karena melibatkan beberapa pejabat tinggi negara. Para politisi kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang intinya adalah dukungan kepada pemerintah agar segera menuntaskan kasus ini dengan cepat dan menindak para pejabat yang terlibat di dalamnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tanpa memandang siapa dan apa jabatannya. Pemerintah kemudian merasa perlu untuk menuntaskan kasus ini, karena menyangkut citra

pemerintahan yang tercemar oleh perbuatan oknum-oknum pejabat negara. Walaupun sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan Agung dan juga Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelidiki kasus ini secara intensif, namun berbagai usaha itu belum terlihat hasil yang dapat memuaskan bagi semua pihak, terutama masyarakat umum. Bahkan hasil akhir dari proses penuntasan kasus BAPINDO ini cukup mengecewakan banyak pihak, karena hanya dengan vonis hukuman yang ringan untuk suatu tindak pidana besar KKN yang menyangkut uang rakyat.

Para mahasiswa, perkumpulan pemuda, dan beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) menanggapi kasus BAPINDO dengan melakukan unjuk rasa di berbagai daerahnya masing-masing dengan tuntutan yang hampir serupa, yaitu penyelesaian kasus secepatnya dan pemberian hukuman bagi para pelakunya. Reaksi-reaksi yang terjadi di masyarakat terhadap kasus BAPINDO menunjukkan bahwa media massa, dalam hal ini surat kabar *Republika*, mempunyai peranan yang cukup besar dalam mengontrol pemerintahan dan mengoreksi penyelewengan yang ada dengan informasi yang diberikan, sehingga masyarakat menjadi tahu dan mengerti dengan keadaan mereka serta dapat bertindak untuk menyelamatkan nasib mereka dan tidak lagi dibodohi oleh penguasa negeri ini.

Akhirnya, konteks kasus BAPINDO, yang melibatkan tiga pejabat penting pada masa Orde Baru tahun 1994, harus dilihat dalam persaingan politik dari kelas menengah Muslim yang tengah pasang pada tahun 1990-an, yang pada masa-masa awal Orde Baru di tahun 1970/1980-an mengalami surut dan

dimarginalisasikan. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam kasus BAPINDO dinilai sebagai representasi dari penguasa WNI (Warga Negara Indonesia) keturunan Cina; pejabat atau penguasa yang non-Muslim; serta birokrat yang kurang komit atau abai dengan kepentingan politik umat Islam. Dalam konteks media massa, juga jelas menggambarkan bahwa surat kabar *Republika* di Jakarta, yang dibidani oleh ICMI, ingin menunjukkan peran dan persaingan politiknya dengan media arus utama pada masa Orde Baru, yang didominasi oleh golongan non-Muslim, atau media massa yang netral terhadap agama Islam.⁵

Referensi

- Abar, A. Zaini. (1997). "Kritik Sosial, Pers, dan Politik Indonesia" dalam Mahfud M.D. [ed]. *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit VII Press.
- Adji, Oemar Seno. (1974). *Media Massa dan Hukum*. Djakarta: Penerbit Erlangga.
- Affi, Subhan. (2005). "Profil Pers Islam di Era Reformasi" dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.3, No.3 [September – Desember]. Tersedia secara online juga di: <http://eprints.upnyk.ac.id/16987/1/PERS%20ISLAM-Subhan%20Afi.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 27 Desember 2017].
- Alatas, S.H. (1983). *Mitos Pribumi Malas: Citra Orang Jawa, Melayu, dan Filipina dalam Kapitalisme Kolonial*. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.
- Alatas, S.H. (1985). *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.
- Ali, Fachry & Bahtiar Effendy. (1986). *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Ali, Fachry & Kholid Novianto. (1997). *Politik Komunikasi Harmoko: Dari Rakyat ke Panggung Politik*. Jakarta: Penerbit Intermassa.

⁵*Pernyataan:* Saya, dengan ini, menyatakan bahwa artikel ini adalah karya asli saya sendiri; dan ianya bukan merupakan hasil plagiat, karena semua kutipan dan gagasan atau konsep yang disebutkan dalam artikel ini dicantumkan secara lengkap dan benar dalam Referensi, sesuai dengan panduan umum pengutipan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

- Aly, Bactiar. (1986). "Mencari Perspektif Baru Isi Surat Kabar Indonesia" dalam *Persuratkabaran Indonesia dalam Era Informasi*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Anshori, Dadang. (2003). "Catatan Pojok dan Kritik 'Jurus Kepiting' Pers Indonesia" dalam Andi Suwirta & M. Syaom Barliana [eds]. *Membaca itu Indah: Menyambut 65 Tahun Drs. Haji Zulkabir*. Bandung: IKA UPI [Ikatan Alumni, Universitas Pendidikan Indonesia] Press.
- Anwar, Rosihan. (1983). *Menulis dalam Air: Sebuah Otobiografi*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Anwar, M. Syafi'i. (1995). *Pemikiran dan Aksi Islam: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Paramadina.
- Anwar, Jauharul. (2012). "Transformasi Strategi Harian *Republika* dalam Ranah Jurnalistik dari Era Orde Baru hingga Era Reformasi, 1990-2010". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Depok: Program Studi Sosiologi FISIP UI [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia]. Tersedia secara online juga di: <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20280963-Jauharul%20Anwar.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 14 Desember 2017].
- Arifin, Zainul. (2009). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.
- Asikin, Zainal. (1997). *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Assegaff, D.H. (1983). *Jurnalistik Masa Kini: Pengantar ke Praktek Kewartawanan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Aspinal, Edward [ed]. (2000). *Titik Tolak Reformasi: Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*. Yogyakarta: Penerbit LKiS.
- Basri, Muhammad Chatib. (1994). "Medan, Edy Tansil, dan Ekonomi Kita" dalam majalah *Prospek*. Jakarta: 7 Mei.
- Basri, Faisal et al. (2013). *Menemukan Konsensus Kebangsaan Baru: Negara, Pasar, dan Cita-cita Keadilan*. Jakarta: Penerbit PUSAD [Pusat Studi Agama & Demokrasi], Yayasan Wakaf Paramadina. Tersedia online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/816-ID-menemukan-konsensus-kebangsaan-baru-negara-pasar-dan-cita-cita-keadilan.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 14 Desember 2017].
- Baswir, Revrisond. (2004). *Drama Ekonomi Indonesia: Belajar dari Kegagalan Ekonomi Orde Baru*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Berita dalam surat kabar *Republika*. Jakarta: 19 Mei 1994.
- Berita dalam surat kabar *Republika*. Jakarta: 20 Mei 1994.
- Berita dalam surat kabar *Republika*. Jakarta: 21 Mei 1994.
- Berita dalam surat kabar *Republika*. Jakarta: 22 Mei 1994.
- Berita dalam surat kabar *Republika*. Jakarta: 23 Mei 1994.
- Berita dalam surat kabar *Republika*. Jakarta: 24 Mei 1994.
- Boot, Anne & Peter McCawley. (1990). *Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.
- Britton, Peter. (1996). *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia*. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.
- Bungin, Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Busye, M. (1997). *Golkar dan Harmoko: Man of the Year*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Catatan pojok "Rehat" dalam surat kabar *Republika*. Jakarta: 13 Maret 1994.
- Catatan pojok "Rehat" dalam surat kabar *Republika*. Jakarta: 17 Maret 1994.
- Catatan pojok "Rehat" dalam surat kabar *Republika*. Jakarta: 15 April 1994.
- Crouch, Harold. (1999). *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Terjemahan.
- Culla, Adi Suryadi. (1999). *Patah Tumbuh, Hilang Berganti: Sketsa Pergolakan Mahasiswa dalam Politik dan Sejarah, 1908-1998*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djaroto, T. (2000). *Manajemen Penerbitan Pers*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Djiwandono, Soedradjat. (2001). *Mengelola Bank Indonesia dalam Masa Krisis*. Jakarta: Penerbit PT LP3ES Indonesia.
- Ekasari, Lusi. (2015). "Proporsi Berita Keislaman dalam Surat Kabar *Republika*". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN [Universitas Islam Negeri] Walisongo. Tersedia secara online juga di: <http://eprints.walisongo.ac.id/4946/1/101211064.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 27 Desember 2017].
- Elson, Robert E. (2001). *Suharto: A Political Biography*. Cambridge UK [United Kingdom]: Cambridge University Press.
- Erianto. (2001). *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: Penerbit LKiS.
- Fatah, E.S. (2000). *Pengkhianatan Demokrasi a la Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Gaffar, Afan. (1999). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geertz, Clifford. (1981). *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, terjemahan Aswab Mahasin.
- Geertz, Clifford. (1986). "Agama di Jawa: Pertentangan dan Perpaduan" dalam Roland Robertson [ed]. *Sosiologi Agama*. Jakarta: Aksara Persada, Terjemahan.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI [Universitas Indonesia], terjemahan Nugroho Notosusanto.

- Hamad, I. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*. Jakarta: Penerbit Granit.
- Haritajaya, Olyvie Bintang. (2017). "Pembredelan Pers di Masa Orde Baru, 1966-1998". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan PIPS FKIP USD [Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma]. Tersedia secara online juga di: http://repository.usd.ac.id/9908/2/121314020_full.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 14 Desember 2017].
- Hefner, Robert W. (1995). *ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, terjemahan Endi Hariyono.
- Hidayat, Dedy N. (2000). "Pers dalam Kontradiksi Kapitalisme Orde Baru" dalam: Dedy N. Hidayat et al. [eds]. *Pers dalam "Revolusi Mei": Runtuhnya sebuah Hegemoni*. Jakarta: PT Gramedia, hlm.127-164.
- Hill, David T. (1995). *The Press in the New Order Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hill, David T. (2011). *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia], Terjemahan.
- Holloway, Richard [ed]. (2002). *Mencuri dari Rakyat: 16 Pelajaran mengenai Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Aksara, Terjemahan.
- Hudini, Tauhid. (2009). "Perubahan Hubungan Militer dengan Umat Islam di Indonesia, Periode 1990-1998". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Jakarta: Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN [Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah. Tersedia secara online juga di: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/10602/1/TAUHID%20HUDINI-FUF.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 14 Desember 2017].
- Ibrahim, I.S. & D.J. Malik [eds]. (1997). *Hegemoni Budaya*. Yogyakarta: Penerbit Bentang.
- Iskantini, Euis. (2001). "Pandangan Harian Umum Pikiran Rakyat terhadap Masalah-masalah Politik Indonesia". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI [Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia].
- Ismaun. (1998). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP [Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan] Bandung.
- Jazimah, Ipong. (2013). "MALARI: Studi Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru" dalam *Jurnal Agastya*, Vol.03, No.01 [Januari], hlm.9-34.
- Jenkins, David. (2010). *Soeharto dan Barisan Jenderal Orde Baru: Rezim Militer Indonesia, 1975-1983*. Depok: Penerbit Komunitas Bambu, Terjemahan.
- Kamsi. (2013). "Citra Gerakan Politik Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Bangsa Indonesia: Studi Era Pra Kemerdekaan sampai dengan Era Orde Baru" dalam *Millah*, Vol.XIII, No.1 [Agustus]. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/123332-ID-citra-gerakan-politik-islam-dalam-lintas.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 14 Desember 2017].
- Kartodirdjo, Sartono. (1982). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kasman, S. (2010). *Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia: Analisis Isi Pemberitaan Harian Kompas dan Republika*. Jakarta: Badan Litbang Diklat Kemenag RI [Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Latihan, Kementerian Agama Republik Indonesia].
- Keller, Anett. (2009). *Tantangan dari Dalam: Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika*. Jakarta: FES [Friedrich Ebert Stiftung] Indonesia Office. Tersedia secara online juga di: <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/09806.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 27 Desember 2017].
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kusuma, Adnan B. [ed]. (2000). *70 Tahun Baramuli: Pantang Menyerah*. Jakarta: Penerbit Yapensi.
- Kusumah, Atma. (1981). *Kebebasan Pers dan Arus Informasi di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Ladiqi, Suyatno & Ismail Suardi Wekke. (2018). *Gambaran Demokrasi, Demokrasi, dan Perkembangan*. Yogyakarta: Penerbit GB [Gawe Buku]. Tersedia secara online juga di: http://www.academia.edu/36308314/GAMBARAN_DEMOKRASI_DEMOGRAFI_DAN_PERKEMBANGAN [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 14 Desember 2017].
- Laily, Hamidah Izzatu. (2016). "Rosihan Anwar dan Pers Indonesia: Studi Eksploratif pada Pemikiran Rosihan Anwar terkait Pers di Indonesia". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Malang: Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UB [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya]. Tersedia secara online juga di: https://www.academia.edu/34525641/ROSIHAN_ANWAR_DAN_PERS_INDONESIA_Studi_Eksploratif_pada_Pemikiran_Rosihan_Anwar_terkait_Pers_di_Indonesia_SKRIPSI [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Maret 2018].
- Lebe, Christopher S. (2018). "Selayang Pandang: Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus". Tersedia secara online di: <https://medium.com/le-citoyen/selayang-pandang-organisasi-mahasiswa-ekstra->

- kampus-7ed6086a8a91 [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 20 Mei 2018].
- Legowo, S.H., I.G. Krisnadi & H. Sumartono. (2013). "Dinamika Politik Rezim Orde Baru di Indonesia: Studi tentang Kegagalan Konsolidasi Politik Rezim Orde Baru pada Tahun 1990-1996" dalam *Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa*, Volume I(1), hlm.1-7. Tersedia secara online juga di: <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/60694/Sivfian%20Hendra.pdf?sequence=1> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 14 Desember 2017].
- Liddle, William R. (1992). *Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.
- Liddle, William R. (1995). *ICMI dan Masa Depan Politik Islam di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Lubis, Mohtar & James C. Scott [eds]. (1985). *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.
- Maarif, Ahmad Syafii. (2002). *Refleksi 50 Tahun Indonesia Merdeka*. Yogyakarta: Penerbit UNY [Universitas Negeri Yogyakarta] Press.
- Majidi, Nasyit [ed]. (1994). *Mega Skandal, Drama Pembobolan, dan Kolusi BAPINDO: Catatan Harian Wartawan*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Makah, Makmur. (1977). "Pojo sebagai Penyalur Kritik" dalam *Prisma*, Th.VI, No.10 [Oktober].
- Makah, Makmur. (1986). "Pojo sebagai Penyalur Kritik" dalam *Demokrasi dan Proses Politik: Seri Pertama*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Makka, A. Makmur. (1996). *ICMI: Gerakan Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Cesindo.
- Mardiani, Annisa. (2014). "Muatan Politik di Balik Soeharto Naik Haji" dalam *HISTORIA: Masa Lampau Selalu Aktual*. Jakarta: 8 Juli. Tersedia secara online juga di: <https://historia.id/agama/articles/muatan-politik-di-balik-soeharto-naik-haji-Py59P> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 14 Desember 2017].
- Masha, Nasihin. (2013). "Dua Dekade Republika untuk Perubahan". Tersedia secara online di: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/01/05/mg26ig-duadekade-republika-untuk-perubahan> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 27 Desember 2017].
- Masha, Nasihin. (2016). "Refleksi 23 Tahun Republika: Saatnya Menjadi Signature Media" dalam *Republika Co.Id*. Jakarta: 4 Januari. Tersedia secara online juga di: <https://republika.co.id/berita/koran/news-update/16/01/04/o0ezc817-refleksi-23-tahun-republika-saatnya-menjadi-signature-media> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 27 Desember 2017].
- Matanasi, Petrik. (2018). "BAPINDO: Penerus BIN yang Digarong oleh Eddy Tansil". Tersedia secara online di: <https://tirta.id/bapindo-penerus-bin-yang-digarong-eddy-tansil-cHkN> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Mei 2018].
- McChesney, Robert. (1998). *Konglomerasi Media Massa dan Ancaman terhadap Demokrasi*. Jakarta: Penerbit AJI [Aliansi Jurnalis Independen].
- Muchtarom, Zaini. (1988). *Santri dan Abangan di Jawa*. Jakarta: Penerbit INIS, Terjemahan.
- Muhammad, Rusli. (1994). "Korupsi sebagai Suatu Bentuk White Collar Crime" dalam *Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/84713-ID-korupsi-sebagai-suatu-bentuk-white-colla.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 27 Desember 2017].
- Muhammad, Mar'ie. (2003). "Pembobolan Bank: Sumber dan Pencegahannya". Tersedia secara online di: http://www.transparansi.or.id/berita/berita-oktober2003/berita2_271003.html [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 14 Desember 2017].
- Nesi, Antonius. (2011). "Koherensi dan Kohensi Wacana Bahasa Indonesia dalam Surat Kabar: Studi Kasus Wacana Berita Utama dan Surat Pembaca Kompas, Republika, Kedaulatan Rakyat, dan Bernas Jogja Edisi Agustus 2009". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP USD [Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma]. Tersedia secara online juga di: https://repository.usd.ac.id/21302/2/051224002_Full.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 14 Desember 2017].
- Nugroho, Bimo et al. (1999). *Politik Media Mengemas Berita*. Jakarta: Penerbit: ISAI [Institut Studi Arus Informasi].
- "Pengelompokan ABRI Hijau dan ABRI Merah Putih pada 1990-1998". Tersedia secara online di: <http://depoktren.com/2014/06/18/pengelompokan-abri-hijau-dan-abri-merah-putih-pada-1990-1998/> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 14 Desember 2017].
- Pour, Julius. (1997). *Laksamana Sudomo: Mengatasi Gelombang Kehidupan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pour, Julius. (2007). *Benny: Tragedi Seorang Loyalis*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Prambadi, Didi et al. (1994). *Buku Putih Tempo: Pemberedelan itu*. Jakarta: Alumni Majalah Tempo.
- Pranowo, M. Bambang. (2009). *Memahami Islam di Jawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rachmadi, F. (1990). *Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*. Jakarta: PT Gramedia.
- Rahmah, Gina Siti, Andi Suwirta & Moch Eryk Kamsori. (2016). "Kiprah Politik Harmoko pada Masa Orde Baru melalui Analisis Biografi, 1983-1999" dalam *FACTUM*, Vol.5, No.2 [Oktober]. Tersedia secara online juga di: http://jurnal.upi.edu/file/GINA_SITI_RAHMAH,_S_MEK.pdf [diakses

- di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Maret 2018]. *Republika* [surat kabar]. Jakarta: 1991.
- Ricklefs, M.C. (1998). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ruslan, Heri. (2012). "Mengenang Sudomo: Saya Dendam kepada Eddy Tansil" dalam *Republika Co.Id*. Jakarta: 18 April. Tersedia secara online juga di: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/04/18/m2nunn-mengenang-sudomo-saya-dendam-kepada-eddy-tansil> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 27 Desember 2017].
- Sadikin, Ali & K.H. Ramadhan. (1995). *Pers Bertanya, Bang Ali Menjawab*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Said, Tribuana. (1998). *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Saidi, Zaim. (1998). *Soeharto Menjaring Matahari: Tarik-Ulur Reformasi Ekonomi Orde Baru Pasca 1980*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Sitompul, Zulkarnain. (2005). "Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank" dalam *Hukum Bisnis*, Vol.24, No.1.
- Sjahir. (1994). "Kredit Macet BAPINDO: Bukan Hal Baru" dalam *Spektrum Ekonomi Politik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI [Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia], hlm.104-108.
- Sjamsuddin, Helius. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sobur, Alex. (2008). "Membaca 'Pojo' Koran" dalam *Mediator*, Vol.9, No.1 [Juni]. Tersedia secara online juga di: <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/viewFile/1135/696> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 27 Desember 2017].
- Soegiarso, Mufti A.S. et al. (1996). *Peran Serta Pers Menegakkan Pancasila*. Jakarta: Yayasan Penegak Pers Pancasila.
- Sudharmono. (1997). *Pengalaman dalam Masa Pengabdian: Sebuah Otobiografi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sudibyo, Agus. (2001). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: Penerbit LKiS.
- Sudrajat. (2017). "Cerita Berhaji para Tokoh: Ketika Soeharto Kian Mesra dengan Islam Setelah Naik Haji" dalam *Detiknews*. Jakarta: 1 September. Tersedia secara online juga di: <https://news.detik.com/berita/d-3624700/ketika-soeharto-kian-mesra-dengan-islam-setelah-naik-haji> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 14 Desember 2017].
- Sukandi, A.K. [ed]. (1999). *Politik Kekerasan Orde Baru: Akankah Berlanjut?* Bandung: Penerbit Mizan.
- Sulaiman, Dedek. (2008). "Deideologi Politik Islam: Kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam Pemberlakuan Azas Tunggal". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Jakarta: Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN [Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah. Tersedia secara online juga di: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8230/1/DEDEK%20SULAIMAN-FUE.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 14 Desember 2017].
- Sumarwan, F.R. (2005). "Mewaspadai Pembobolan Bank Melalui Transaksi L/C" dalam *Hukum Bisnis*, Vol.24, No.1.
- Suryadinata, Leo. (1992). *Golkar dan Militer: Studi tentang Budaya Politik*. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.
- Susanto, Astrid. (1982). *Komunikasi Massa 1*. Jakarta: Bina Cipta.
- Suseno, F. Magnis. (1997). *Mencari Sosok Demokrasi: Satuan Telaah Filosofis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Suwirta, Andi. (2000). *Suara dari dua Kota: Revolusi Indonesia dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka (Jakarta) dan Kedaualatan Rakyat (Yogyakarta), 1945-1947*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Suwirta, Andi. (2004). "Atang Ruswita, Pikiran Rakyat, dan Kritik Sosial" dalam Asmawi Zainul & Didin Saripudin [eds]. *50 Tahun Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, 1954-2004: Mozaik Pemikiran tentang Sejarah, Pendidikan Sejarah, dan Budaya*. Bandung: Historia Utama Press.
- Suwirta, Andi. (2015). *Revolusi Indonesia dalam News & Views: Sebuah Antologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Syafrian, Dzulfian. (2015). "Deregulasi Perbankan dan Praktek Rent-Seeking para Tikus Orde Baru" dalam *KOMPASIANA: Beyond Blogging*. Jakarta: 26 Juni. Tersedia secara online juga di: <https://www.kompasiana.com/dzulfiansyafrian/5500d9aaa333110d17510171/deregulasi-perbankan-dan-praktek-rent-seeking-para-tikus-orde-baru?page=all> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 14 Desember 2017].
- Tischer, T.P. (2000). *Metode Analisis Teks dan Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Terjemahan.
- Wijaya, Krisna. (2002). "Kejahatan Perbankan" dalam *Perbankan Nasional: Catatan Kolom demi Kolom*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, cetakan kedua.
- Winarno, Bondan. (2013). *J.B. Sumarlin: Cabe Rawit yang Lahir di Sawah*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Winters, Jeffrey A. (1999). *Dosa-dosa Politik Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Djambatan, Terjemahan.
- Wonohito, M. (1984). "Kode Etik Kewartawanan" dalam Tribuana Said [ed]. *Pers dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Deppen RI [Departemen Penerangan Republik Indonesia].
- Zakaria, A. (2010). "Kebijakan Redaksional Surat Kabar *Republika* dalam Penulisan Berita pada Rubrik Internasional". *Skripsi Sarjana Tidak Dipublikasikan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN [Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah.



Kasus BAPINDO dalam Sorotan Surat Kabar *Republika* di Jakarta

(Sumber: <https://www.kaskus.co.id/thread>, 20/5/2018)

Akhirnya, konteks kasus BAPINDO, yang melibatkan tiga pejabat penting pada masa Orde Baru tahun 1994, harus dilihat dalam persaingan politik dari kelas menengah Muslim yang tengah pasang pada tahun 1990-an, yang pada masa-masa awal Orde Baru di tahun 1970/1980-an mengalami surut dan dimarginalisasikan. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam kasus BAPINDO dinilai sebagai representasi dari penguasaha WNI (Warga Negara Indonesia) keturunan Cina; pejabat atau penguasa yang non-Muslim; serta birokrat yang kurang komit atau abai dengan kepentingan politik umat Islam. Dalam konteks media massa, juga jelas menggambarkan bahwa surat kabar *Republika* di Jakarta, yang dibidani oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), ingin menunjukkan peran dan persaingan politiknya dengan media arus utama pada masa Orde Baru, yang didominasi oleh golongan non-Muslim, atau media massa yang netral terhadap agama Islam.